

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI PROVINSI DKI JAKARTA

Irham Tri Atmojo

NPP. 31.0335

Asdaf Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: irhammus@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Romi Saputram, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The research focuses on the supervision activities carried out by the National Unity and Political Agency in DKI Jakarta Province regarding mass organization activities. While regulations exist, monitoring and compliance issues persist due to limited awareness and participation from the mass organizations themselves. This study explores the supervisory mechanisms in place, identifies hindering factors, and examines the effectiveness of these efforts. **Purpose** The aim of this research is to study, analyze and describe how to National unity and Political Agency supervises organizations in DKI Jakarta. **Method:** Employing a qualitative research design, this study adopts descriptive methods with an inductive approach to closely analyze the supervisory functions of the National Unity and Political Agency. Data collection was conducted through interviews with key stakeholders and document analysis, ensuring a comprehensive understanding of the supervision process. **Results:** The findings indicate that while the National Unity and Political Agency plays an active role in overseeing mass organization activities, there are significant challenges related to the organizations' compliance with reporting requirements. This often stems from a lack of awareness about the importance of such processes. **Conclusion:** Despite robust supervisory frameworks, the efficacy of these measures is compromised by the insufficient involvement of the organizations themselves. It is recommended to enhance awareness programs and improve communication between the supervisory body and mass organizations to foster better compliance and effective supervision.

Keywords: Community, Organizations, Supervision

ABSTRAK

Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berfokus pada kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi masyarakat (Ormas). Meskipun regulasi telah ada, isu pemantauan dan kepatuhan tetap persisten karena kesadaran dan partisipasi yang terbatas dari Ormas itu sendiri. Studi ini mengeksplorasi mekanisme pengawasan yang ada, mengidentifikasi faktor penghambat, dan mengevaluasi efektivitas upaya tersebut. **Tujuan** Penelitian ini adalah Untuk mengkaji menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ke ormas di Provinsi DKI Jakarta. **Metode:** Studi ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk menganalisis secara mendalam fungsi pengawasan oleh Kesbangpol. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan kunci dan analisis dokumen, memastikan pemahaman menyeluruh tentang proses pengawasan. **Hasil:** Temuan menunjukkan bahwa Kesbangpol berperan aktif dalam mengawasi aktivitas Ormas, namun ada tantangan signifikan terkait kepatuhan Ormas terhadap persyaratan pelaporan. Hal ini seringkali berasal dari kurangnya kesadaran tentang pentingnya proses tersebut. **Kesimpulan:** Meskipun kerangka pengawasan yang kuat, efikasi dari langkah-langkah ini terkompromi oleh keterlibatan yang tidak memadai dari Ormas itu sendiri. Disarankan untuk meningkatkan program kesadaran dan memperbaiki komunikasi antara badan pengawas dan Ormas untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik dan pengawasan yang efektif.

Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan, Pengawasan, Kesbangpol

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi kemasyarakatan berkembang seiring dengan kehidupan bermasyarakat. Organisasi kemasyarakatan pada pelaksanaan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Segala sesuatu yang melibatkan organisasi kemasyarakatan diatur oleh hukum, termasuk pembentukan dan pembubarannya. Negara menjamin kebebasan berserikat sepanjang tidak melanggar Pancasila atau Konstitusi. Organisasi masyarakat kemudian diberi izin untuk berdiri dan berlari.

Organisasi masyarakat diciptakan oleh rakyat untuk membantu pemerintah mendirikan bangsa sesuai dengan Pancasila. Namun, karena fanatisme kader organisasi. Ormas sekarang menjadi alat yang digunakan oleh beberapa orang terpilih untuk mencapai kekuasaan karena mudah untuk menarik massa ke dalam gerakan. Ormas digunakan dalam situasi ini sebagai taktik politik untuk memenangkan pemilih dan dukungan bagi partai politik. Organisasi masyarakat yang diciptakan dengan tujuan bebas dari pengaruh politik telah kehilangan misi dan menjadi instrumen pengaruh politik. Karena mengembangkan dan mengatur kelompok berskala besar berada di bawah lingkup pemerintah.

Paradigma baru tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimunculkan oleh dinamika perkembangan ormas dan perubahan lembaga pemerintahan (Wibowo)

Organisasi kemasyarakatan, sering disebut Ormas, telah hadir, tumbuh, dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Ormas berperan penting dalam membangun masyarakat sipil yang kuat dan melindungi hak-hak warga, berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan-tujuan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945, Ormas menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan partisipasi dalam pengembangan bangsa dan negara. Namun, keterlibatan aktif ini juga mengundang dinamika dan tantangan tertentu, terutama ketika ormas digunakan sebagai alat politik yang dapat menyimpang dari tujuan awalnya. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan organisasi berbasis masa yang tidak bertujuan politis (Adi Johan 2012). Ormas terbentuk karena adanya kesamaan misal agama, sosial, budaya, pendidikan, profesi atau suatu tujuan tertentu. Ormas dibentuk oleh individu atau pun kelompok atas kesamaan dengan sukarela tanpa tujuan komersial untuk mendapatkan keuntungan. Ormas sebagaimana sarana partisipasi masyarakat sangatlah penting bagi negara untuk melaksanakan dan sebagai agen pembangunan. Partisipasi masyarakat sangatlah menentukan proses pembangunan yang berhasil. Untuk itu, Ormas sangatlah menarik bagi penulis untuk mengkaji apakah ormas sebagai media bagi masyarakat melakukan partisipasi sudah sesuai atau belum dalam pelaksanaannya.

Menurut Ibnu Kencana Pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada. Pemerintah adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengoordinasikan, memimpin, dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit tubuh pemerintahan

Dalam konteks Provinsi DKI Jakarta, kehadiran dan aktivitas Ormas mendapat perhatian khusus mengingat posisinya sebagai ibu kota negara dan pusat politik Indonesia. Keadiversifikasian kegiatan Ormas di DKI Jakarta, dari yang bersifat sosial budaya hingga politik, membuat pengawasan dan pembinaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjadi sangat kritis. Kesbangpol memiliki tugas untuk memastikan bahwa Ormas beroperasi dalam koridor yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, menghindari praktik-praktik yang bisa mengarah pada disintegrasi bangsa. Menurut pendapat Almond dan Coleman dalam Anggara (2013) struktur politik dibedakan atas infrastruktur yang terdiri atas struktur politik masyarakat, suasana kehidupan politik masyarakat, dan sektor politik masyarakat; dan suprastruktur politik yang terdiri atas sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, dan sektor politik pemerintahan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan dalam penelitian terkait dengan pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta telah diidentifikasi melalui analisis yang mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah ada upaya pembinaan dan pengawasan yang cukup baik, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang berdampak pada efektivitas pengawasan Kesbangpol terhadap aktivitas ormas di Jakarta.

Pertama, terdapat kurangnya kesadaran dari organisasi masyarakat itu sendiri mengenai pentingnya pelaporan kegiatan mereka kepada Kesbangpol. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan ormas dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, sehingga menghambat Kesbangpol dalam melakukan pengawasan yang

efektif.

Kedua, penelitian ini juga menemukan bahwa masih ada kekurangan dalam sumber daya yang tersedia bagi Kesbangpol, termasuk keterbatasan jumlah personel yang memiliki keahlian khusus dalam mengawasi ormas. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan pelatihan yang lebih baik bagi petugas Kesbangpol guna menghadapi kompleksitas tantangan yang semakin berkembang dalam pengawasan ormas.

Dengan demikian, kesenjangan ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang bisa mengeksplorasi solusi konkret guna mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam rangka menciptakan tata kelola yang lebih baik dan transparan. Penelitian ini berharap dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam merancang strategi yang efektif untuk optimasi pembinaan dan pengawasan ormas di DKI Jakarta.

Menurut Nia (2011) organisasi kemasyarakatan adalah wadah yang dibentuk sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.

Organisasi Masyarakat (ORMAS) adalah kelompok atau badan yang terorganisir secara formal yang beroperasi di dalam suatu masyarakat dengan tujuan tertentu. Tujuan ORMAS dapat bervariasi secara signifikan, mulai dari kegiatan amal, pendidikan, politik, keagamaan, sosial, hingga kegiatan ekonomi. Mereka dapat menjadi penggerak perubahan sosial, advokasi kepentingan khusus, atau sumber dukungan bagi anggota masyarakat.

Ormas Memiliki Penjelasan dan Tujuan

1. Tujuan dan Fokus: ORMAS memiliki tujuan yang jelas dan fokus pada kegiatan atau isu tertentu. Tujuan tersebut dapat bervariasi dari penggalangan dana untuk amal, advokasi politik, penyediaan layanan sosial, atau mendukung aspirasi agama tertentu.

2. Struktur Organisasi: Biasanya, ORMAS memiliki struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik, termasuk pemimpin, pengurus, dan anggota. Struktur ini membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan dan memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai.

3. Keanggotaan: ORMAS dapat terdiri dari berbagai anggota, mulai dari individu biasa hingga organisasi besar atau perusahaan. Keanggotaan bisa terbuka untuk siapa pun yang berbagi visi dan misi organisasi tersebut.

4. Kegiatan dan Program: ORMAS biasanya terlibat dalam berbagai kegiatan dan program untuk mencapai tujuan mereka. Ini mungkin mencakup acara penggalangan dana, kampanye kesadaran, layanan komunitas, atau advokasi politik.

5. Pentingnya Partisipasi: Partisipasi anggota dalam ORMAS sering kali merupakan kunci keberhasilan organisasi tersebut. Semakin banyak orang yang terlibat dan berkontribusi, semakin besar dampak yang dapat mereka capai.

6. Kerjasama dan Jaringan: ORMAS sering bekerja sama dengan organisasi lain, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk memperluas jangkauan dan memperkuat upaya mereka.

7. Pengelolaan dan Transparansi: Pengelolaan dana dan sumber daya lainnya dengan transparan dan akuntabel adalah penting untuk mempertahankan kepercayaan anggota dan dukungan publik terhadap ORMAS.

8. Peran dalam Masyarakat: ORMAS sering kali memainkan peran penting dalam masyarakat, baik sebagai agen perubahan, advokat masyarakat, penyedia layanan, atau sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

Penjelasan ini memberikan gambaran umum tentang apa yang merupakan ORMAS dan bagaimana mereka berfungsi dalam konteks masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa ORMAS dapat sangat bervariasi dalam tujuan, ukuran, struktur, dan dampaknya tergantung pada konteksnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang berjudul Peran Lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Sumatra Utara Dalam Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Aulia Asmul Fauzi, 2017) menjelaskan bahwa peran kesbangpol di provinsi Sumatra Utara sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan undang undang dalam melaksanakan pembinaan ataupun pemberdayaan organisasi masyarakat yang ada dan sudah mencoba menertibkan pelanggaran yang dibuat oleh organisasi masyarakat dengan upaya hukum yang berlaku. Pada penelitian Peran KESBANGPOL LINMAS Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan menyimpulkan bahwa KESBANGPOL LINMAS untuk menjaga kesetabilan dengan cara pembinaan terhadap organisasi masyarakat yang ada, pembinaan tersebut dilakukan lewat pelatihan pelatihan di bidang sosial politik dan melakukan sosialisasi kepada ormas ormas yang keberadaannya belum terdaftar serta melakukan pengawasan dan memonitoring kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat. (Yasni Efyanti, 2018) Dalam penelitian ini di tambahkan juga pembinaan dalam aspek politik, sedangkan penelitian kedepan lebih menekankan kepada pembinaan dalam aspek peran kesbangpol dalam organisasi masyarakat serta pencegahan organisasi masyarakat terpapar paham paham intoleran. Keberadaan ormas memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan negara, namun di sisi lain banyak ormas yang melakukan pelanggaran UU seperti bertindak anarkis dan mengganggu dalam lingkungan masyarakat maka dari itu peran badan kesatuan bangsa untuk pembinaan dan penertiban sangat diperlukan. Di Kota Cimahi provinsi Jawa Barat yang telah dijelaskan dalam penelitian Peran Badan Kesatuan Bangsa Dalam Pembinaan dan Penertiban Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat (Chandra Wira Hadi Santika, 2022).

Hasil dari penelitian Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sungai Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan bahwa peran kesbangpol di Kota Sungai Penuh mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik. (Suci Hermiken, 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengangkat aspek vital dalam pemahaman dan evaluasi pembinaan serta pengawasan organisasi masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di DKI Jakarta, sebuah topik yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam literatur akademik. Kebutuhan untuk memahami dinamika internal dan eksternal dalam pengawasan ormas menjadi semakin mendesak, mengingat peranan strategis ormas dalam pemberdayaan masyarakat dan pengaruhnya terhadap stabilitas sosial politik. Kajian ini mengusulkan perspektif baru dengan mengintegrasikan teori pengawasan organisasi dengan praktik di lapangan, memungkinkan pembahasan yang lebih holistik dan aplikatif.

Kajian ini memperkenalkan pendekatan metodologis yang inovatif dengan menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk membedah interaksi antara ormas dan pengawasnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap berbagai nuansa dan dinamika yang belum tergalai sebelumnya, seperti persepsi dan respons ormas terhadap kebijakan pengawasan. Dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan survei, penelitian ini menawarkan insights yang kaya akan makna dan aplikasi praktis, membedakan diri dari studi sebelumnya yang lebih banyak bersifat deskriptif dan normatif.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik pembinaan dan pengawasan ormas di Indonesia. Temuan dari studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk reformulasi kebijakan yang lebih efektif, dengan menawarkan model pengawasan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh ormas di DKI Jakarta. Lebih lanjut, kajian ini berpotensi menjadi referensi penting bagi pemangku kebijakan dan lembaga non-pemerintah dalam memformulasikan strategi yang lebih inklusif dan partisipatif dalam governance ormas.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengawasan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap kegiatan Ormas di Provinsi DKI Jakarta, memahami faktor-faktor yang menghambat serta mengidentifikasi upaya-upaya dalam mengimplementasikan pengawasan tersebut. Khususnya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur yang ada dalam memonitor dan mengevaluasi aktivitas Ormas, serta menganalisis dampaknya terhadap kestabilan sosial dan politik di region tersebut. Dengan menggunakan metodologi kualitatif melalui pendekatan deskriptif dan induktif, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan Ormas serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan Ormas.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif oleh Penelitian deskriptif menurut Sarwono adalah penelitian yang mencoba untuk secara tepat mencirikan ciri-ciri individu, keadaan, atau kelompok tertentu, serta untuk menetapkan apakah ada hubungan antara satu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Sepanjang tentang manusia atau sejarah kehidupan manusia, apapun yang digali dan dipelajari di sini adalah objek penelitian yang lengkap. Menurut Moleong Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang seluk-beluk

yang terjadi dalam interaksi manusia. Sasaran utama penelitian kualitatif adalah manusia, dengan segala budaya dan perilakunya. Dengan penjelasan di atas, penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif dalam penelitian ini mendeskripsikan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini dilakukan secara mengklasifikasikan, lalu menganalisis serta menyimpulkan data baru yang disimpulkan dari khusus ke umum.

Menurut Creswell (2016:267) dokumen terdiri dari dua kelompok, yakni dokumen publik seperti makalah atau koran dan dokumen privat seperti jurnal dan buku harian. Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan pengumpulan data dokumentasi. Peneliti juga hendak mengumpulkan data menggunakan media kamera, alat perekam serta catatan dalam menulis dibantu dengan alat bantu dokumen lainnya

Sumber Data menurut Suharsimi Arikunto adalah sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana ada diperoleh

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi (2013) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu

3.1. Pengawasan Organisasi

Pengawasan menurut Siagian dalam Sujamto (1986:14) yaitu sebagai proses penilikan dari pelaksanaan kegiatan organisasi secara menyeluruh untuk menjamin semua pekerjaan terlaksana sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap aktivitas organisasi masyarakat pemuda di Provinsi DKI Jakarta. Berlandaskan teori yang dikemukakan oleh Handoko (1998), penelitian ini memfokuskan pada empat dimensi pengawasan, yaitu penetapan sasaran dan standar pelaksanaan, penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, dan perbandingan pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa organisasi masyarakat beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang mana dijabarkan dalam Surat Edaran Nomor 220/1485/SJ tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan.

Penetapan sasaran dan standar pelaksanaan pengawasan aktivitas ormas pemuda oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di DKI Jakarta mengacu pada pedoman yang diterbitkan melalui Surat Edaran Mendagri. Sasaran dan standar ini memastikan bahwa semua ormas pemuda di DKI Jakarta melaporkan kegiatan mereka secara berkala, minimal enam bulan sekali.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Tim Terpadu, yang bertugas mengumpulkan keterangan, melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas ormas, serta menyusun rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan. Tim ini juga bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, dan sesuai dengan kebutuhan. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa ormas pemuda beroperasi dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan dan berkontribusi positif

terhadap masyarakat.

Kemudian, pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan aktivitas ormas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di DKI Jakarta juga memerlukan penetapan pengukuran yang akurat untuk memastikan efektivitas kegiatan pengawasan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan ormas untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan teratur. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil pengawasan menjadi acuan penting dalam peningkatan pengawasan ormas, yang secara tidak langsung menunjang stabilitas dan keamanan sosial di DKI Jakarta.

Organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila sering kali terjadi pertikaian, misalnya, beberapa Ormas mungkin percaya bahwa mereka berhak atas bagian-bagian tertentu dari komunitas yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan internal (oknum ormas), yang menyebabkan konflik di lingkungan tersebut. Konflik antar Ormas sering mengakibatkan kerugian bagi Ormas yang berselisih dan masyarakat setempat dimana Ormas berselisih karena hal-hal yang berbau seperti mempertahankan eksistensi Ormas, seperti sengketa wilayah, miskomunikasi antar anggota Ormas, atau saling menghina. (I Gusti Ayu Ratih)

Perpindahan penduduk masuk ke Jakarta merupakan penyebab dari peningkatan penduduk yang signifikan tersebut. Fenomena tersebut telah mengubah Jakarta menjadi salah satu perkotaan terbesar di dunia. Anggapan akan harapan terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik dan menjanjikan di Jakarta sehingga menarik orang-orang baru untuk terus berdatangan.

Hasil analisis terhadap aliran imigran menunjukkan bahwa, setelah Jawa Barat, kelompok terbesar ialah berasal dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur; sejumlah besar juga berasal dari Pulau Sumatera. Adapun kelompok populasi lain seperti masyarakat keturunan Arab, Cina, India, bahkan Eropa dan Amerika, juga menyumbang keberagaman populasi di Jakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti dapat mengatakan bahwa kota yang sekaligus menyandang gelar sebagai sebuah provinsi ini merupakan tempat bermukimnya penduduk yang sangat heterogen. Masyarakat Jakarta berasal dari berbagai macam latar belakang suku, agama, ras, antar golongan, juga dari berbagai lapisan masyarakat dengan stratifikasi sosial yang beragam.

Tampaknya, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dalam pengajuan Pelaporan Ormas masih belum bisa meningkatkan kesadaran organisasi kemasyarakatan dalam memprosesnya. Ini terlihat pada persentase organisasi kemasyarakatan yang melaporkan organisasi kemasyarakatannya di Kesbangpol DKI Jakarta lebih sedikit dibandingkan dengan organisasi kemasyarakatan yang tidak melaksanakan pelaporan organisasi kemasyarakatannya di Kesbangpol DKI Jakarta. Selain disebabkan oleh tingkat kesadaran organisasi kemasyarakatan itu sendiri serta kurangnya pemahaman Organisasi Kemasyarakatan akan pentingnya pelaporan di Kesbangpol DKI Jakarta.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di DKI Jakarta tidak dapat melakukan Tindakan Korektif apabila ormas tidak melakukan pelaporan yang dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur tentang hukuman atau sanksi bagi Organisasi Kemasyarakatan yang tidak melaksanakan pelaporan aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta hanya dapat berupa teguran terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang tidak melaksanakan pelaporan organisasi kemasyarakatannya dengan harapan organisasi kemasyarakatan tersebut segera melaksanakan pelaporan organisasi kemasyarakatannya.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sama dengan hal penelitian sebelumnya tentang Konflik antar Ormas kepemudaan di Kota Medan yang terjadi selama tahun 2012 sampai tahun 2013, diantaranya terjadi dikarenakan faktor perekonomian namun dapat juga faktor lainnya yang sifatnya sepele seperti persinggungan perasaan. Konflik antar Ormas di Kota Surakarta yang terjadi dikarenakan faktor ideologi keagamaan radikal kanan. Konflik tersebut melibatkan perseteruan antara Ormas dengan masyarakat setempat. Terdapat Persamaan Tujuan dari dilakukannya penelitian ini agar mengetahui penyebab konflik yang terjadi antar masyarakat dan juga cara penanggannya kemudian persamaan berikutnya adalah kesamaan dalam metode penelitian yaitu kualitatif. Penelitian ini berfokus pada konflik antar organisasi masyarakat apa adanya peran daribadan kesatuan bangsa dan politik

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Oleh Bakesbangpol belum optimal seperti yang diharapkan dalam Surat Menerti Dalam Negeri Nomor 220/1485/SJ/ Tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan organisasi kemasyarakatan dan kurang rutin nya pihak kesbang melakukan monitoring kepada ormas
- b. faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik DKI Jakarta dalam melaksanakan pengawasan aktivitas ormas di DKI Jakarta berupa kurangnya kesadaran dari organisasi masyarakat itu sendiri tentang pentingnya pelaporan kegiatan aktivitas ormas kepada badan kesatuan bangsa dan politik DKI Jakarta dan kurangnya wewenang badan kesatuan bangsa dan politik DKI Jakarta untuk memberikan sanksi kepada Organisasi masyarakat.
- c. Dalam mengatasi hambatan yang dilakukan dalam pengawasan dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan DKI Jakarta oleh Bakesbangpol melakukan dua cari yaitu :
- d. Melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban organisasi masyarakat upaya dari badan kesbangpol untuk meningkatkan kesadaran ormas dengan melakukan langkah memberikan soialiasi kepada ormas secara rutin 3 bulan sekali ataupun setahun 4 kali
- e. memfasilitasi organisasi masyarakat apabila diperlukan organisasi masyarakat melakukan pelaporan kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik DKI Jakarta akan memfasilitasi yang dibutuhkan oleh organiasi masyarakat yang melakukan kegiatan tertentu.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini terutama terletak pada ruang lingkup dan kedalaman analisis yang dibatasi oleh waktu serta sumber daya yang tersedia. Penelitian ini hanya menjangkau aktivitas Ormas dalam wilayah DKI Jakarta dan bergantung pada data yang bisa diakses melalui wawancara dan dokumentasi resmi, yang mungkin tidak sepenuhnya mencakup dinamika kompleks atau resistensi internal dalam Ormas. Selanjutnya, penelitian ini belum mengintegrasikan perspektif masyarakat luas yang terpengaruh oleh kegiatan Ormas, yang bisa memberikan insight lebih mendalam tentang efek sosial dari intervensi Bakesbangpol.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah masa depan penelitian ini bisa fokus pada penerapan model pengawasan yang lebih inovatif dan partisipatif, melibatkan teknologi informasi untuk mendapatkan feedback yang real-time dan akurat dari masyarakat tentang dampak aktivitas Ormas. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi pengaruh politik yang lebih luas dan dinamika kekuasaan dalam

pengawasan Ormas, yang akan memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang tantangan yang dihadapi Bakesbangpol dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, melibatkan studi komparatif dengan kota-kota lain di Indonesia dapat memberikan wawasan tentang strategi pengawasan yang berbeda dan lebih efektif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih khusus kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta yang telah memberikan akses dan informasi penting yang sangat bermanfaat bagi kelengkapan data penelitian. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para responden yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka, yang tanpa itu penelitian ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Terakhir, peneliti berterima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang selalu memberikan dukungan moral serta motivasi selama proses penelitian berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Johan, 'Perkembangan Awal Organisasi Kemasyarakatan, Sejarah Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan', 2012
- Aulia Asmul Fauzi, 'Peran Lembaga Kesatuan Bangsa Politik (KESBANGPOL) Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Studi Di Kantor Kesbangpol Sumatera Utara)', 2017
- Anggara, S. (2013). Sistem Politik Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Chandra Wira Hadi Santika, 'Peran Badan Kesatuan Bangsa Dalam Pembinaan Dan Penertiban Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat', 2020.
- Creswell, John W. 2017. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogya: Pustaka Pelajar
- Handoko, T. Hani. 1998. Manajemen. Edisi ke-2. Yogyakarta : BPF
- I Gusti Ayu Ratih Charisma Dewi Atmika, M. Adnan Madjid dan Ichsan Malik. 2021. *Konflik Antar Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug di Jakarta Tahun 2019-2020*. Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, Vol. 6, No.1. Halaman 53-78.
- Moleong, 'Penelitian kualitatif '. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008
- Nia (2011) Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan). Yogyakarta: Pustaka Yustisa.
- Sarwono, 'Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif'. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Suci Hermiken, 'Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sungai Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan', JAn Maha, 4.1 (2022), 1–10

Suharsimi Arikunto, 'Prosedur Penelitian' Jakarta ; Rineka Cipta, 2013

Sujanto. (1986). Beberapa Pengertian Di bidang Pengawasn. Jakarta: Ghalia Indah.

Yasni Efyanti, 'Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan'. 18.02, 65–79, 2019.

Wibowo, Catur dan Heman Harefa. 2015. *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah*. Jurnal Bina Praja, Vol. 7 No.1. Halaman 1

